

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pandemi COVID-19 menjadi masa yang sulit bagi semua negara yang mengalaminya, termasuk Indonesia. Pandemi secara langsung berdampak tidak hanya pada aspek kesehatan, tetapi juga aspek kehidupan lainnya, seperti aspek ekonomi dan sosial. Kebijakan pemusnahan sosial dan karantina wilayah dapat membatasi kemampuan masyarakat untuk melakukan kegiatan ekonomi, sehingga menghambat pergerakan barang dan jasa. Situasi ini sudah berlangsung cukup lama sehingga menyebabkan perlambatan pertumbuhan ekonomi di daerah-daerah yang terdampak pandemi COVID-19 (Chaplyuk dkk,2021; McKibbin & Fernando,2020).

Pertumbuhan ekonomi yang lebih rendah diikuti oleh efek ekonomi lainnya, seperti peningkatan lapangan kerja. Dampak ekonomi dari pandemi COVID-19 dapat memicu dampak kesehatan lainnya, seperti dimensi sosial. Masyarakat miskin merupakan salah satu kelompok yang paling rentan terhadap pandemi COVID-19. Selain itu, Bank Dunia memprediksi jumlah orang miskin di seluruh dunia akan meningkat selama pandemi (Setyadi & Indriyani, 2021).

Pembangunan ekonomi merupakan indikator penting dari kesejahteraan masyarakat suatu negara. Jelas bahwa jika suatu negara berhasil dalam pembangunan ekonomi, maka pertumbuhannya juga demikian, tetapi satu-satunya perbedaan adalah bahwa jika pertumbuhan ekonomi suatu negara meningkat, itu adalah jaminan bahwa

negara tersebut akan mengalami keberhasilan pembangunan. Artinya tidak ada hal ini karena pembangunan suatu negara diukur dari kualitas sumber daya seperti kesejahteraan, keamanan, sumber daya manusia dan lingkungan. Kesejahteraan merupakan kondisi dimana terpenuhinya kebutuhan material, spiritual dan sosial penduduk negara agar dapat hidup berkecukupan dan mampu mengembangkan diri, sehingga mampu melaksanakan fungsi sosial dan ekonominya (BPS,2022). Kesejahteraan dapat digambarkan salah satunya berdasarkan tingkat kemiskinan di Indonesia.

Dalam Proper, kemiskinan dipahami seperti kondisi kekurangan uang dan barang demi menjamin keberlangsungan hidup. Berdasarkan World Bank (2004) Salah satu penyebab kemiskinan adalah kurangnya pendapatan dan kekayaan untuk membantu memenuhi kebutuhan dasar seperti makanan, pakaian, perumahan, kesehatan yang layak dan pendidikan. Selain itu, kemiskinan juga terkait dengan terbatasnya kesempatan kerja, dimana mereka yang tergolong miskin biasanya menganggur dan umumnya memiliki tingkat pendidikan dan kesehatan yang tidak memadai. Kemiskinan merupakan masalah krusial yang dihadapi di negara berkembang, seperti Indonesia. Faktor-faktor penentu tersebut dibutuhkan sebagai acuan untuk menentukan kebijakan yang diambil pemerintah agar kemiskinan dapat diatasi di daerah Indonesia (Tommy, H., Antoni, A., & Nurul, H. 2021).

Pemerintah Indonesia menegerti bahwa salah satu cara untuk menaikkan kapasitas perekonomian ialah dengan melaksanakan pembangunan nasional perlu menciptakan lapangan kerja dan menyelenggarakan kehidupan yang cukup bagi kesejahteraan rakyat Indonesia. mengenali. Berbagai program dan aktivitas pembangunan ditujukan untuk pembangunan daerah, terutama di daerah dengan tingkat kemiskinan yang relatif tinggi. Pembangunan daerah tertentu harus dilaksanakan secara terpadu dan berkesinambungan sesuai dengan prioritas keperluan masing-masing daerah. Salah satu indikator utama dalam keberhasilan pembangunan nasional adalah laju penurunan jumlah penduduk miskin (Novianto, 2018).

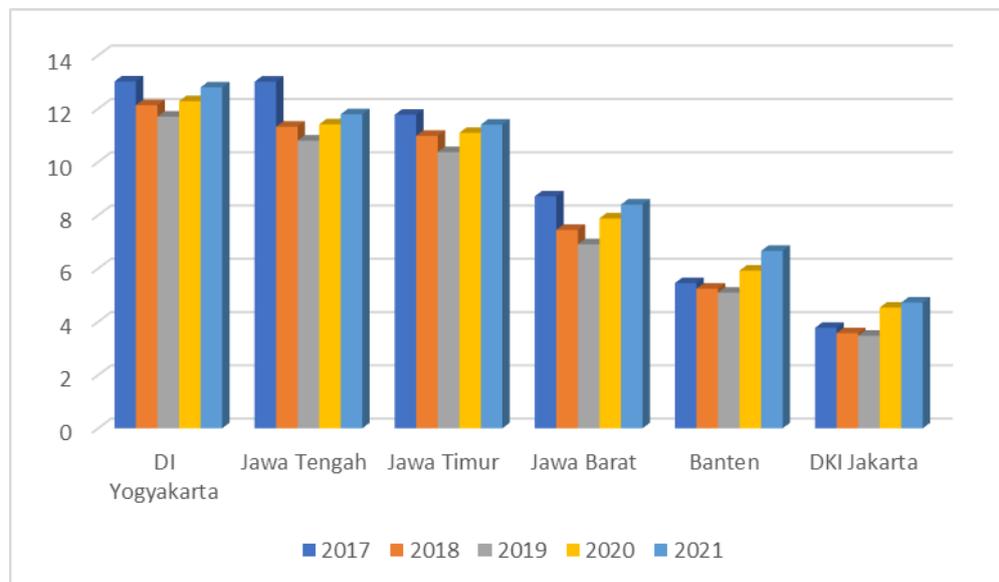
Dalam ekonomi islam pembangunan ekonomi tentunya berlandaskan pada Quran dan hadist artinya segala kebijakan yang dibuat untuk meningkatkan pembangunan tidak bisa bertentangan dengan dua hal tersebut. Di dalam Al-Quran terdapat banyak ayat yang memotivasi manusia untuk bekerja keras, rajin, dan tekun di berbagai bidang sesuai dengan kredibilitas dan kapasitasnya guna memakmurkan bumi, sebagaimana ditegaskan dalam firman-Nya :

وَسَتُورَ عَمَلَكُمْ اللَّهُ يَفْسِيرَ اَعْمَلُوا وَقُلْ

تَعْمَلُونَ كُنْتُمْ بِمَا فَيُنَبِّئُكُمْ دَةَ لَشَّهَا وَ اَلْغَيْبِ عِلْمِ اِلَى رَدُّونَ

"Dan katakanlah, Bekerjalah kamu, maka Allah akan melihat pekerjaanmu, begitu juga Rasul-Nya dan orang-orang mukmin, dan kamu akan dikembalikan kepada (Allah) Yang Mengetahui yang gaib dan yang nyata, lalu diberitakan-Nya kepada kamu apa yang telah kamu kerjakan."(QS. At-Taubah 9: Ayat 105)

Permasalahan strategis yang dihadapi di Jawa Tengah ialah tingginya nilai kemiskinan. Angka kemiskinan di Jawa Tengah masih cukup tinggi dibandingkan provinsi lain di Indonesia. Kemiskinan sedang menjadi masalah yang serius, ditandai dengan masih adanya kekurangan pangan, kesulitan dalam memenuhi kebutuhan pokok, dan kesulitan bagi banyak orang dalam mencari pekerjaan. Hal ini menunjukkan bahwa pemerintah masih perlu memberikan perhatian khusus terhadap kemiskinan di Indonesia, sebagai ukuran kesejahteraan masyarakat (Novianto, 2018).



Sumber : Badan Pusat Statistik Indonesia, diolah

Grafik 1.1

**Presentase Kemiskinan Enam Provinsi di Pulau Jawa Tahun 2017-2021
(Persen)**

Dari grafik diatas dapat di bandingkan oleh lima provinsi berbeda di Jawa, tingkat kemiskinan rata-rata Jawa Tengah ada di urutan kedua setelah DI Yogyakarta. Dari tabel tersebut hampir seluruh pulau mengalami kenaikan pada presentase kemiskinan di tahun 2020 yang di karenakan pada tahun tersebut munculnya COVID-19, yang mengakibatkan mempengaruhi jumlah pertumbuhan tingkat kemiskinan. Pada tahun 2021 juga terus mengalami kenaikan, pada Jawa Tengah yang awalnya tahun 2020 hanya 11,41 persen naik menjadi 11,79 persen.

Tabel 1.1
Jumlah Penduduk Miskin dan Presentase Kemiskinan Jawa Tengah 2017-2021

Tahun	Jumlah Penduduk Miskin (Jiwa)	Presentase (%)
2017	4450.72	13.01
2018	3897.20	11.32
2019	3743.23	10.80
2020	3743.23	11.41
2021	4109.75	11.79

Sumber : BPS Jawa Tengah

Dapat dilihat pada Tabel 1, hasil upaya pemerintah provinsi Jawa Tengah di dalam mengentaskan kemiskinan masih menunjukkan hasil yang beragam. Jumlah penduduk dan angka kemiskinan di Jawa Tengah berfluktuasi selama lima tahun terakhir.

Pada hakikatnya pembangunan adalah proses perubahan yang berjalan secara terus menerus untuk mencapai suatu kondisi dimana kehidupan yang lebih baik secara material maupun spriritual. Pembangunan haruslah dipandang sebagai suatu proses multidimensional yang mencakup berbagai perubahan structural social, sikap-sikap masyarakat, serta institusi nasional, disamping tetap mengejar akselerasi pertumbuhan ekonomi, penanganan ketimpangan pendapatan dan pengentasan kemiskinan (Putera, 2018).

Persoalan kemiskinan di Indonesia dipengaruhi oleh sejumlah faktor. Faktor penyebab kemiskinan di Indonesia yaitu pendapatan per kapita yang rendah, upah minimum regional (UMR) yang rendah, Rata-rata Lama Sekolah (RLS) yang masih rendah juga, dan meningkatnya jumlah Angkatan kerja (Padriyansyah & Syahputera, 2022).

Pertumbuhan ekonomi merupakan indikator keberhasilan pembangunan. Padahal tujuan utama pertumbuhan ekonomi adalah peningkatan kapasitas produksi. Peningkatan kapasitas produksi membutuhkan tambahan tenaga kerja, mengurangi angkatan kerja dan mengurangi tingkat kemiskinan.

Menurut Wiguna (2013) sebagaimana yang dikutip oleh Novianto (2018) Dalam perjalanan pertumbuhan ekonomi, salah satu indikator yang digunakan untuk mengidentifikasi tanda-tanda pertumbuhan ekonomi suatu negara atau daerah adalah penggunaan Produk Domestik Bruto

(FRDP) daerah. Melalui PDRB, Anda dapat melihat aktivitas ekonomi yang dilakukan dan dicapai oleh suatu negara atau wilayah dalam kurun waktu tertentu.

Selanjutnya melalui pemanfaatan pembangunan manusia. Pembangunan manusia dapat dicapai dengan berinvestasi di berbagai sektor semacam pendidikan dan kesehatan yang bermanfaat bagi masyarakat miskin. Layanan pendidikan dan kesehatan yang murah sehingga memberi peluang dapat mendongkrak daya produksi dan meningkatkan pendapatan.

Rendahnya tingkat pendidikan, keterbatasan modal dan terbatasnya lapangan pekerjaan juga menyebabkan timbulnya penduduk miskin. Keterbatasan modal dan Pendidikan manusia berhubungan dengan bagaimana masyarakat mengembangkan kehidupannya. Masyarakat sudah pasti berharap mendapatkan kehidupan yang layak sama halnya terpenuhinya sandang, pangan, dan papan, serta pendidikan guna menjalani kehidupan. Rata-rata Lama Sekolah (RLS) menunjukkan pembangunan kualitas hidup manusia sehingga dapat tercapai kehidupan yang layak diatas garis kemiskinan. RLS tidak terlepas dari tenaga kerja atau manusia itu sendiri. Karena dengan menempuh pendidikan yang tinggi dapat menciptakan tenaga kerja yang lebih berkualitas. Tenaga kerja yakni modal bergeraknya roda pembangunan.

Tenaga kerja pada hakikatnya terbagi menjadi Angkatan kerja dan bukan Angkatan kerja. Presentase angkatan kerja terdapat banyaknya penduduk usia kerja dinamakan tingkat partisipasi angkatan kerja (TPAK). Tingkat partisipasi angkatan kerja juga turut berkontribusi dalam besar kecilnya tingkat produktivitas masyarakat suatu wilayah. Karena pada dasarnya, tujuan dari seseorang berkerja yaitu untuk memperoleh penghasilan sehingga bisa memenuhi kebutuhan hidupnya.

Tingkat partisipasi Angkatan kerja di Jawa Tengah dalam kurun waktu tiga tahun terus mengalami peningkatan. Mantra (2003) menjelaskan, bahwasanya TPAK yang semakin besar, maka jumlah angkatan kerja dalam kelompok yang sama juga akan terus meningkat. Kebalikannya, bertambahnya jumlah penduduk yang bersekolah dan mengurus rumah tangga, maka jumlah orang yang tergolong bukan angkatan kerja semakin besar dan jumlah angkatan kerja menurun serta TPAK juga akan menurun (Septiawan & Wijaya, 2020).

Perekonomian yang berkembang pesat belum tentu menjamin karakter daerah yang sejahtera jika lapangan kerja terus meluas untuk menarik tenaga kerja baru. Memasuki dunia kerja, dalam hal ini pertumbuhan ekonomi nasional dan daerah, berjalan seiring dengan memperluas kesempatan kerja. Bagaimanapun, kerja faktor produksi merupakan faktor penting dalam pertumbuhan ekonomi, di samping pengaruh modal dari alam dan teknologi. Oleh karena itu, pertumbuhan populasi juga harus di imbangi dengan perluasan peluang kerja untuk

membenarkan angkatan kerja yang ada. Perkembangan penduduk yang cepat menyebabkan peningkatan jumlah tenaga kerja. Tingkat aktivitas adalah rasio total angkatan kerja terhadap penduduk usia kerja dalam kelompok yang sama.

Upah Minimum Regional juga merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi tingkat kemiskinan. Apabila Upah Minimum Regional Meningkat otomatis Tingkat Kemiskinan akan berkurang dan sebaliknya. Jika UMR menurun maka tingkat kemiskinan juga akan meningkat.

Dampak ekonomi juga diperkirakan akan parah. Dibandingkan dengan proyeksi baseline sebesar 5 persen pertumbuhan ekonomi 2020, berbagai penelitian memperkirakan COVID-19 akan menurunkan kondisi Indonesia pertumbuhan ekonomi menjadi antara 1 dan 4 persen. Kami menemukan bahwa di bawah dampak COVID-19 yang paling ringan pada pertumbuhan ekonomi, angka kemiskinan akan meningkat dari 9,2 persen pada September 2019 menjadi 9,7 persen pada akhir tahun 2020. Ini menyiratkan bahwa 1,3 juta lebih orang akan didorong ke dalam kemiskinan. Di bawah proyeksi paling parah, tingkat kemiskinan akan meningkat menjadi 12,4 persen, menyiratkan 8,5 juta lebih orang akan menjadi miskin. Yang terakhir berarti bahwa kemajuan Indonesia dalam mengurangi kemiskinan di atas dekade terakhir akan musnah. Implikasinya, Indonesia perlu memperluas sosialnya program perlindungan untuk membantu orang miskin baru selain orang miskin yang ada. Tingkat kemiskinan sebelum covid-19 dari tahun 2017-2019

mengalami penurunan 707,49 ribu jiwa dan mengalami kenaikan lagi pada tahun 2020-2021 sebesar 366,52 ribu jiwa.

Besar kecilnya tingkat kemiskinan suatu daerah dapat di pengaruhi oleh Produk Domestik Bruto Regional (PDRB), Upah Minimum Regional (UMR), Rata-Rata Lama Sekolah (RLS), Tingkat Partisipasi Tenaga Kerja (TPAK) serta Covid-19, seperti yang sudah di paparkan sebelumnya.

Berdasarkan uraian diatas, maka dalam penyusunan skripsi ini, penulis memilih judul **“ANALISIS DETERMINAN KEMISKINAN DI KABUPATEN/KOTA PROVINSI JAWA TENGAH PERIODE 2017-2021”**

B. Rumusan Masalah Penelitian

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dikemukakan diatas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana pengaruh Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) terhadap Kemiskinan di Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Tengah?
2. Bagaimana pengaruh Upah Minimum Regional (UMR) terhadap Kemiskinan di Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Tengah ?
3. Bagaimana pengaruh Rata-rata Lama Sekolah (RLS) terhadap Kemiskinan di Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Tengah ?
4. Bagaimana pengaruh Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) terhadap Kemiskinan di Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Tengah?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah diatas maka tujuan dari penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui pengaruh Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) terhadap Kemiskinan di Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Tengah.
2. Untuk mengetahui pengaruh Upah Minimum Regional (UMR) terhadap Kemiskinan di Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Tengah.
3. Untuk mengetahui pengaruh Rata-rata Lama Sekolah (RLS) terhadap Kemiskinan di Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Tengah.
4. Untuk mengetahui pengaruh Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) terhadap Kemiskinan di Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Tengah.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat dilakukanya penelitian :

1. Secara teoritis
 - a. Media untuk mencoba menerapkan pemahaman teoritis yang diperoleh di bangku kuliah dalam kehidupan nyata
 - b. Hasil penelitian ini dapat dipakai sebagai referensi bagi peneliti selanjutnya.
2. Secara praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi dan bahan kajian tentang faktor-faktor yang mempengaruhi Kemiskinan di Provinsi Jawa Tengah, sehingga pemerintah daerah dapat

menggunakannya sebagai referensi dalam pembuatan kebijakan dalam mengurangi tingkat kemiskinan sehingga dapat menciptakan pertumbuhan ekonomi yang berkualitas.